

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang dengan metode *convenience sampling*, yaitu responden yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data. Waktu yang diperlukan oleh peneliti untuk penyebaran kuesioner sampai dengan terkumpulnya kuesioner kurang lebih 4 minggu, dengan jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 110 responden, dapat dilihat pada tabel 4.1.

#### **4.1 Data Responden**

Hasil penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Kuesioner yang didistribusikan	110	100%
Kuesioner yang kembali	110	100%
Jumlah kuesioner yang diolah	110	100%

Sumber: hasil olah data, 2019

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 110 kuesioner yang didistribusikan kepada responden, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 110 kuesioner atau sebesar 100%, sehingga kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 110 atau 100%.

#### 4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jenis Kelamin Responden**

<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Laki –laki	68	61.8%
Perempuan	42	38.2%
Total	110	100%

Sumber: hasil olah data, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki – laki yaitu sejumlah 68 orang (61.8%), dan yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 42 orang (38.2%). Kondisi ini menggambarkan bahwa dimana wajib pajak yang melakukan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan.

#### 4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan usia yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Usia Responden**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
26-35 tahun	14	12.7%
36-45 tahun	79	71.8%
>45 tahun	17	15.5%
Total	110	100%

Sumber: hasil olah data, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia 36-45 tahun, yaitu sebanyak 79 orang (71,8%), sedangkan responden dengan usia 26-35 tahun sebanyak 14 orang (12.7%), dan responden dengan usia > 45 tahun adalah sebanyak 17 orang (15.5%).

#### **4.2 Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai suatu data. Hasil analisis ststistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
<i>Tax Evasion</i>	110	1.00	3.00	1.7273	.46746
Keadilan Pajak	110	1.00	3.00	1.9727	.51508
Sistem Perpajakan	110	2.00	4.00	3.1818	.52779
Diskriminasi	110	1.00	3.00	1.8636	.53290
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	110	2.00	4.00	3.2000	.60275
<i>Tax Moral</i>	110	1.00	3.00	1.7818	.49552

Sumber : hasil olah data, 2019

Tabel 4.4 menyatakan bahwa pada variabel *tax evasion* (Y) jawaban minimum responden sebesar 1.00 dan maksimum sebesar 3.00, dengan rata-rata total jawaban 1.7273 dan standar deviasi sebesar .46746. Variabel keadilan (X<sub>1</sub>) jawaban minimum responden sebesar 1.00 dan maksimum sebesar 3.00, dengan rata-rata total jawaban 1.9727 dan standar deviasi sebesar .51508. Variabel sistem perpajakan (X<sub>2</sub>) jawaban minimum responden sebesar 2.00 dan maksimum sebesar 4.00, dengan rata-rata total jawaban 3.1818 dan standar deviasi sebesar .52779. Variabel diskriminasi (X<sub>3</sub>) jawaban minimum responden sebesar 1.00 dan maksimum sebesar 3.00 dengan rata-rata total jawaban 1.8636, dan standar deviasi sebesar .53290. Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X<sub>4</sub>) jawaban minimum responden sebesar 2.00 dan maksimum sebesar 4.00, dengan rata-rata total jawaban 3.2000, dan standar deviasi sebesar .60275. Kemudian,

variabel *tax moral* (*Z*) jawaban minimum responden sebesar 1.00 dan maksimum sebesar 3.00, dengan rata-rata total jawaban 1.7818 dan standar deviasi sebesar .49522.

### 4.3 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut (Gozali, 2013). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan *r* hitung dengan *Sig.* 2-tailed. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid apabila *r* hitung  $\geq$  *Sig.* 2-tailed dengan signifikansi 0.05. berikut adalah hasil pengujian validitas:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	<i>Pearson Correlation (r hit)</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
Keadilan (X1)	1	0.883	0.000	Valid
	2	0.886	0.000	Valid
	3	0.897	0.000	Valid
	4	0.890	0.000	Valid
	5	0.905	0.000	Valid
	6	0.897	0.000	Valid
Sistem Perpajakan (X2)	1	0.832	0.000	Valid
	2	0.928	0.000	Valid
	3	0.895	0.000	Valid
	4	0.947	0.000	Valid
Diskriminasi	1	0.823	0.000	Valid

(X3)	2	0.910	0.000	Valid
	3	0.903	0.000	Valid
	4	0.906	0.000	Valid
	5	0.904	0.000	Valid
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X4)	1	0.932	0.000	Valid
	2	0.868	0.000	Valid
	3	0.943	0.000	Valid
	4	0.890	0.000	Valid
	5	0.937	0.000	Valid
	6	0.870	0.000	Valid
<i>Tax Moral</i> (Z)	1	0.899	0.000	Valid
	2	0.916	0.000	Valid
	3	0.883	0.000	Valid
	4	0.699	0.000	Valid
	5	0.916	0.000	Valid
<i>Tax Evasion</i> (Y)	1	0.752	0.000	Valid
	2	0.706	0.000	Valid
	3	0.873	0.000	Valid
	4	0.868	0.000	Valid
	5	0.767	0.000	Valid
	6	0.862	0.000	Valid
	7	0.752	0.000	Valid
	8	0.865	0.000	Valid

Sumber: hasil olah data, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir instrument pernyataan dari setiap variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan

terdeteksinya kecurangan, *tax moral* dan *tax evasion* menunjukkan valid, karena  $r$  hitung  $\geq$  Sig. 2-tailed.

#### 4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, atau untuk menguji sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Suatu variabel dikatakan memiliki reliabilitas yang baik, apabila nilai *Cronbach Alphanya*  $\geq$  0.70. berikut adalah hasil pengujian reliabilitas:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Keadilan	.952	Reliabel
Sistem Perpajakan	.945	Reliabel
Diskriminasi	.934	Reliabel
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	.960	Reliabel
<i>Tax Moral</i>	.914	Reliabel
<i>Tax Evasion</i>	.922	Reliabel

Sumber: hasil olah data, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa semua instrumen sudah memenuhi reliabilitas, karena berada diatas nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.70

#### 4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak

(Gozali, 2013). Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* lebih dari 0.05 (Gozali, 2011). Hasil pengujian normalitas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Normalitas**

<i>Test Statistic</i>	Nilai Signifikansi	Keterangan
1.061	0.210	Normal

Sumber: hasil olah data, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 bahwa semua variabel memiliki *Asymp Sig (2-tailed)* lebih dari 0.05, sehingga data dalam penilian ini berdistribusi normal.

#### **4.5.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Uji ini dilakukan dengan cara mencari VIF dan *Tolerance*. Apabila nilai *Tolerance* > 0.1 atau VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Keadilan	0.548	1.824	Tidak Multikolinieritas
Sistem Perpajakan	0.425	2.353	Tidak Multikolinieritas
Diskriminasi	0.271	3.689	Tidak Multikolinieritas
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0.179	5.579	Tidak Multikolinieritas

Sumber: hasil olah data (2019)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas untuk setiap variabel. Hal ini dilihat dari nilai *tolerance* untuk variabel keadilan pajak sebesar  $0.548 > 0.1$  dan nilai VIF sebesar  $1.824 < 10$ , variabel sistem perpajakan menunjukkan nilai *tolerance* sebesar  $0.425 > 0.1$  dan nilai VIF sebesar  $2.353 < 10$ , variabel diskriminasi menunjukkan nilai *tolerance* sebesar  $0.271 > 0.1$  dan nilai VIF sebesar  $3.689 < 10$ , variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan menunjukkan nilai *tolerance* sebesar  $0.179 > 0.1$  dan nilai VIF sebesar  $5.579 < 10$ .

#### 4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk menguji heterokedastisitas. Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai sig  $> 0.05$  maka, tidak ada indikasi

heterokedastisitas (Gozali, 2011). Berikut adalah hasil pengujian heterokedastisitas:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Keadilan	.544	Bebas heterokedastisitas
Sistem Perpajakan	.878	Bebas heterokedastisitas
Diskriminasi	.772	Bebas heterokedastisitas
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	.477	Bebas heterokedastisitas

Sumber: hasil olah data, 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05, sehingga tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

#### **4.6 Analisis Regresi Berganda**

Uji hipotesis ini menggunakan uji analisis regresi berganda, untuk menguji pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* melalui variabel moderating *tax moral*, dalam analisis regresi berganda ini akan diuji secara simultan (uji F) maupun secara parsial (uji t). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		t	Sig
	B	<i>Std. Error</i>		
(Constant)	25.742	1.958	13.149	0.000
Keadilan (x1)	-0.131	0.068	-1.935	0.056
Sistem Perpajakan (x2)	-0.288	0.104	-2.764	0.007
Diskriminasi (x3)	0.547	0.124	4.415	0.000
Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan (x4)	-0.515	0.126	-4.091	0.000
Tax Moral	-0.149	0.191	-1.140	0.030
Keadilan*Tax Moral	-0.007	0.003	-2.057	0.042
Sistem Perpajakan*Tax Moral	-0.018	0.008	-2.378	0.019
Diskriminasi*Tax Moral	0.001	0.006	0.249	0.804
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan*Tax Moral	-0.014	0.007	-1.972	0.051

Sumber: hasil olah data, 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien untuk variabel keadilan sebesar -0.131 dengan nilai signifikansi 0.056. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan keadilan pajak

terhadap *tax evasion* tidak signifikan, karena nilai signifikansinya lebih dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax evasion*.

- b. Nilai koefisien untuk variabel sistem perpajakan sebesar -0.288 dengan nilai signifikansi 0.007. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan sistem perpajakan terhadap *tax evasion* signifikan, karena nilai signifikansinya kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*.
- c. Nilai koefisien untuk variabel diskriminasi sebesar 0.547 dengan nilai signifikansi 0.000. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan diskriminasi terhadap *tax evasion* signifikan, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*.
- d. Nilai koefisien untuk variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebesar -0.515 dengan nilai signifikansi 0.000. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* signifikan, karena nilai signifikansinya kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*.
- e. Nilai koefisien untuk hipotesis kelima yaitu sebesar -0.007 dengan nilai signifikansi 0.042. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan keadilan pajak terhadap *tax evasion* yang dimoderasi *tax moral* signifikan, karena nilai

signifikansinya lebih kecil dari 5%. Sehingga disimpulkan bahwa variabel *tax moral* secara negatif signifikan memoderasi variabel keadilan pajak terhadap *tax evasion*.

- f. Nilai koefisien untuk hipotesis keenam yaitu sebesar -0.018 dengan nilai signifikansi 0.019. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan variabel sistem perpajakan terhadap *tax evasion* yang dimoderasi *tax moral* signifikan, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%. Sehingga disimpulkan bahwa variabel *tax moral* secara negative signifikan memoderasi sistem perpajakan terhadap *tax evasion*.
- g. Nilai koefisien untuk hipotesis ketujuh 0.001 dan nilai signifikansinya 0.804. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan variabel diskriminasi terhadap *tax evasion* yang dimoderasi *tax moral* tidak signifikan, karena nilai signifikansinya lebih dari 5%. Sehingga disimpulkan bahwa variabel *tax moral* tidak memoderasi diskriminasi terhadap *tax evasion*.
- h. Nilai koefisien hipotesis kedelapan yaitu sebesar -0.014 dan nilai signifikansi 0.051. Pada tingkat signifikansi 5% hubungan variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* tidak signifikan, karena nilai signifikansinya lebih dari 5%. Sehingga disimpulkan bahwa variabel *tax moral* tidak memoderasi kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion*.

Uji signifikansi F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan fit. Adapun hasil dari uji signifikansi F disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.11****Hasil uji F**

<b>Model</b>	<b>Sum of Squares</b>	<b>Df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
Regression	845.808	9	105.726	26.402	0.000
Residual	981.962	101	4.005		
Total	1226.406	109			

Sumber: hasil data diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti bahwa nilai signifikansi dibawah 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan *fit*.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Adapun hasil dari uji koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.12****Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Adjusted R Square</b>	<b>Keterangan</b>
0.651	Variabel independen memiliki pengaruh sebesar 65,1% terhadap variabel dependen.

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel 4.12, diperoleh nilai *Adjusted R Square* berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat uji regresi berganda sebesar 0.651. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, adalah

sebesar 65,1%. Sedangkan sisanya sebesar 34,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

#### **4.7 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.7.1 Pengaruh Keadilan Terhadap *Tax Evasion***

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak memiliki nilai signifikansi  $\alpha$  0.056, dengan nilai koefisien ( $\beta_1$ ) - 0.131. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Jadi, semakin tinggi atau rendahnya tingkatan keadilan pajak tidak mempengaruhi tinggi rendahnya *tax evasion*. Penyebab tidak berpengaruhnya keadilan pajak terhadap *tax evasion*, kemungkinan dikarenakan faktor yang terjadi di lapangan, seperti pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Meskipun keadilan pajak tergolong cukup baik namun tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak, dan ada kemungkinan bahwa karena keadilan hanya di Undang-Undang saja namun tidak dalam penerapannya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wika (2018), Sasmito (2017), Utami (2016), Lumban Tobing (2015) dan Pulungan yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani

(2017) dan Armina & Tahar (2015) yang menyebutkan keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DJP dan pemerintah agar dalam penyusunan Undang-Undang dapat menjadi penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan. Hasil dari penyusunan Undang – Undang yang diberlakukan di masyarakat perlu melihat aspek apakah pemerintah mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penentuan peraturan perpajakan, dan juga perlindungan kepada wajib pajak atas tindakan fiskus yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian, keadilan dalam penggunaan uang pajak berkaitan dengan sampai sejauh mana hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga wajib pajak merasakan bahwa pajak yang mereka bayarkan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima.

#### **4.7.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion***

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki nilai signifikansi  $\alpha$  0.007 dengan nilai koefisien ( $\beta_2$ ) -0.288. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* didukung, karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Artinya semakin baik sistem perpajakan membuat perilaku *tax evasion* rendah. Berdasarkan hasil penerimaan pajak KPP Pratama Magelang bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan penerimaan pajak, ini menunjukkan bahwa sistem

perpajakan KPP Pratama Magelang dirasa sudah cukup baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak sehingga perilaku *tax evasion* dapat ditekan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ciptaningtyas (2018), Ismarita (2018), dan Bahari (2016) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Suatu sistem perpajakan dikatakan baik apabila prosedur dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporannya dapat dilakukan dengan mudah sehingga mendorong minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, sebaik apa sistem perpajakan yang sudah berjalan tidak selalu membuat realisasi penerimaan pajak menjadi sesuai dengan target apabila tingkat *tax evasion* yang dilakukan masih tergolong tinggi.

#### **4.7.3 Pengaruh Diskriminasi Terhadap *Tax Evasion***

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa variabel diskriminasi memiliki nilai signifikansi  $\alpha$  0.000, dengan nilai koefisien ( $\beta_3$ ) 0.547 menunjukkan bahwa H3 didukung, karena nilai signifikansinya kurang dari 0.05. Artinya semakin tinggi atau rendahnya diskriminasi mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat *tax evasion*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ciptaningtyas (2018), Ismarita (2018), Fatimah & Wardani (2017), Armina & Tahar (2015) yang menyebutkan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Sedangkan penelitian Friskianti & Handayani (2017) menyatakan bahawa diskriminasi berpengaruh terhadap *tax evasion*. Diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun tingkat diskriminasi yang tergolong sedang tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat diskriminasi yang tergolong sedang tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan karena meskipun tingkat diskriminasi rendah, tindakan penggelapan pajak bisa dilakukan dikarenakan adanya kepentingan diri sendiri dan bukan karena faktor diskriminasi.

#### **4.7.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap *Tax***

##### ***Evasion***

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan mempunyai nilai signifikansi  $\alpha$  0.000, dengan nilai koefisien ( $\beta_4$ ) -0.515 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* didukung, karena nilai signifikansinya kurang dari 0.05. Artinya semakin tinggi atau rendahnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat *tax evasion*.

Alasan diterimanya variabel ini juga sejalan dengan *Theory Planned of Behavior*, terkait alasan apa yang dapat mempengaruhi tindakan individu pada bagian *behavioral beliefs* yaitu kepercayaan akan terjadinya suatu perilaku. Jadi, apabila wajib pajak ingin melakukan kecurangan dalam hal perpajakan maka ia harus berpikir kembali bahwa apabila kemungkinan terdeteksinya kecurangan

yang dilakukan melalui pemeriksaan ini tinggi maka, biaya yang nantinya harus ia keluarkan akan semakin tinggi pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradisa (2018) Indriyani et al. (2016), Ulfa (2015), Friskianti (2017) dan Pulungan (2015) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, kemungkinan terdeteksinya kecurangan di KPP Pratama Magelang tergolong tinggi. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Meskipun tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan tergolong tinggi namun tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Kemungkinan karena tindakan penggelapan pajak masih bisa dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menyuap fiskus pajak dengan memberi imbalan kepada fiskus pajak.

#### **4.7.5 *Tax Moral* Memoderasi Keadilan Terhadap *Tax Evasion***

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa variabel keadilan mempunyai nilai signifikansi  $\alpha$  0.042, dengan nilai koefisien ( $\beta_5$ ) -0.007. Sehingga disimpulkan bahwa variabel *tax moral* memoderasi keadilan terhadap

*tax evasion*, karena nilai signifikansinya kurang dari 0.05. Hal ini berarti bahwa moral pajak yang tinggi dapat dipastikan akan mempengaruhi hubungan keadilan dengan *tax evasion*, tetapi tidak menutup kemungkinan dibutuhkan faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut.

Secara teoritis, moralitas dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis. Menurut teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal, dimana moralitas yang dimiliki seseorang merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri dan merupakan ciri kepribadian yang dimiliki individu sehingga dapat diartikan sebagai atribusi disposisional. Semakin tinggi tahapan moralitas individu, semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan pribadinya. Keadilan terhadap pelayanan perpajakan akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan pajak dan moralitas yang berasal dalam diri seseorang diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis. Oleh karena itu dengan adanya *tax moral* yang tinggi dalam diri individu, maka dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antara *keadilan* dengan *tax evasion*.

#### **4.7.6 Tax Moral Memoderasi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion**

Hasil pengujian hipotesis 6 (H6) menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki nilai signifikansi  $\alpha$  0.019, dengan nilai koefisien ( $\beta_6$ ) -0.018. Sehingga disimpulkan bahwa variabel *tax moral* memoderasi sistem perpajakan terhadap *tax evasion*, karena nilai signifikansiya lebih kecil dari 0.05. Hal ini

berarti bahwa moral pajak yang tinggi dapat dipastikan mempengaruhi sistem perpajakan dengan *tax evasion*.

Alasan didukungnya hipotesis ini secara teoritis sesuai dengan *Theory Planned of Behavior*, yaitu *normative beliefs* yang mana ialah keyakinan individu atas harapan dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini berkaitan dengan adanya sistem perpajakan *self assessment* yang diterapkan oleh pemerintah supaya wajib pajak turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sedangkan hal tersebut dapat terwujud apabila wajib pajak memiliki kesadaran dalam hal ini adalah *tax moral*. Sesuai dengan *theory cognitive moral development* yang menjelaskan bahwa individu yang telah mencapai tingkat penalaran moral yang baik akan semakin bertindak etis dan menghindari perilaku *tax evasion*.

#### **4.7.7 Tax Moral Memoderasi Diskriminasi Terhadap Tax Evasion**

Hasil pengujian hipotesis 7 (H7) menunjukkan bahwa variabel diskriminasi memiliki nilai signifikansi  $\alpha$  0.804, dengan nilai koefisien ( $\beta_7$ ) 0.001. Sehingga disimpulkan bahwa variabel *tax moral* tidak memoderasi diskriminasi terhadap *tax evasion*, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya moral pajak tidak dapat dipastikan akan mempengaruhi diskriminasi dengan *tax evasion*.

Kemungkinan yang terjadi mengapa *tax moral* tidak memoderasi diskriminasi terhadap *tax evasion* menurut Rahayu (2010) bahwa moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Tentunya kondisi moral masyarakat yang rendah cenderung akan meningkatkan niat

masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak baik dengan cara legal maupun ilegal. Akan tetapi apabila dilihat dari analisis statistik deskriptif yang mana responden menyatakan bahwa tingkat diskriminasi di KPP Pratama Magelang cukup rendah, hal ini tidak dapat menunjukkan bahwa *tax moral* memoderasi diskriminasi dengan tingkat *tax evasion*, bisa jadi pengambilan sampel yang tidak memadai yang pada umumnya tidak dapat mewakili hasil penelitian dan adanya faktor lain yang mempengaruhi secara signifikan.

Diskriminasi terhadap pelayanan perpajakan akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan pajak dan moralitas yang berasal dalam diri seseorang diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis. Oleh karena itu dengan adanya *tax moral* yang tinggi dalam diri individu, maka dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antara diskriminasi dengan *tax evasion*. Namun dalam penelitian ini variabel *tax moral* bukan sebagai penentu dalam memoderasi hubungan antara diskriminasi dan *tax evasion*.

#### **4.7.8 Tax Moral Memoderasi Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan**

##### **Terhadap Tax Evasion**

Hasil pengujian hipotesis 8 (H8) menunjukkan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki nilai signifikansi  $\alpha$  0.051, dengan nilai koefisien ( $\beta_8$ ) -0.014. Sehingga disimpulkan bahwa *tax moral* tidak memoderasi kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion*, karena nilai nilai signifikansinya lebih dari 0.05.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut Rahman (2013) ialah kemungkinan prosentase terdeteksinya kecurangan apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Presentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan wajib pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan yang ada untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap penggelapan pajak. jadi, apabila seorang wajib pajak memiliki *tax moral* yang tinggi dan mereka menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan tinggi maka ia cenderung akan patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak melakukan tindakan *tax evasion*. Namun dalam penelitian ini variabel *tax moral* bukan sebagai penentu dalam memoderasi hubungan antara kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan *tax evasion*